

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Todaro (1998) dalam Fathul et al (2024) menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan ketersediaan serta pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan, serta memperluas kesempatan sosial dan ekonomi bagi setiap individu. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dinilai semata-mata dari besarnya laju pertumbuhan PDB, melainkan juga dari kemampuan pembangunan tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif. Dalam hal ini, tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi indikator yang penting untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja, semakin baik kondisi perekonomian suatu negara karena mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang bersifat inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, kerap dijumpai fenomena yang dikenal sebagai *jobless growth*, yaitu keadaan di mana laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, namun tidak disertai dengan penciptaan kesempatan kerja yang cukup. Fenomena ini kian kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi dan otomatisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memperluas kapasitas serapan tenaga kerja. Sebagaimana dijelaskan

Mahadita et al (2024), bahwa *jobless growth* telah menjadi persoalan yang banyak dialami negara dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan output ekonomi dengan kemampuan sektor-sektor produksi dalam menyerap pekerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih dalam dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

Secara nasional, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dan pada 2024 mencapai 281.603.800 jiwa, yang berdampak pada naiknya jumlah angkatan kerja menjadi 152.107.603 jiwa (BPS, 2024). Sebagian besar penduduk dan angkatan kerja tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa, menjadikannya wilayah dengan beban demografis terbesar sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan nasional. Kondisi ini semakin penting dikaji ketika dibandingkan dengan data pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2024

No		Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
1.	Bali & Nusa Tenggara	97.49	9.025.335
2.	Sulawesi	96.35	10.827.224
3.	Papua	95.80	3.170.211
4.	Kalimantan	95.52	9.170.333
5.	Sumatera	95.25	31.862.631
6.	Maluku	94.93	1.656.048
7.	Jawa	94.65	86.395.821

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui pada tahun 2024 Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah di Indonesia, yaitu sebesar

94,65%, lebih kecil dibandingkan seluruh wilayah lain seperti Bali & Nusa Tenggara (97,49%), Sulawesi (96,35%), Papua (95,80%), Kalimantan (95,52%), maupun Sumatera (95,25%). Namun pada saat yang sama, Pulau Jawa justru memiliki jumlah angkatan kerja terbesar, yaitu sebesar 86.395.821 jiwa, jauh melampaui wilayah lain yang angkatan kerjanya berada di kisaran 1-32 juta jiwa. Angka tersebut mencakup lebih dari separuh total angkatan kerja Indonesia.

Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang sangat besar dan daya serap pasar kerja yang rendah menunjukkan bahwa meskipun Pulau Jawa memiliki konsentrasi tenaga kerja terbesar tetapi tingkat penyerapannya justru paling rendah. Fakta ini tercermin dari jumlah penganggur yang tercatat masih relatif besar yakni 4.667.471 jiwa (BPS, 2024), menandakan kesempatan kerja belum mampu menampung seluruh pencari kerja. Atas dasar fenomena tersebut, Pulau Jawa dipandang relevan sebagai objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang dapat direpresentasikan melalui indikator rata-rata lama sekolah (Wijayanti & Rahmannisa Mufarrah, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang merefleksikan akumulasi tahun pendidikan formal penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam penguatan keterampilan serta kualitas pekerja. Individu yang menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi umumnya memiliki kompetensi dan kemampuan kerja yang lebih baik, sehingga kesempatan untuk

memperoleh pekerjaan menjadi semakin besar. Pendidikan juga memiliki pengaruh penting terhadap produktivitas tenaga kerja, mengingat kualitas sumber daya manusia sangat menentukan capaian hasil produksi. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang lebih tinggi cenderung mampu menghasilkan output yang lebih optimal dan berkualitas (Yusuf & Ratwianingsih, 2021). Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan peran strategis pendidikan dalam mengembangkan kualitas dan produktivitas pekerja, kajian rata-rata lama sekolah pada wilayah penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Berikut data rata-rata lama sekolah pada enam provinsi di area penelitian disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (dalam tahun)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	10.90	8.31	7.57	9.59	7.71	8.70
2016	10.92	8.41	7.70	9.62	7.78	8.79
2017	10.97	8.46	7.77	9.68	7.87	8.87
2018	11.06	8.61	7.84	9.73	7.93	8.93
2019	11.11	8.79	8.03	9.83	8.11	9.07
2020	11.17	8.96	8.19	9.95	8.31	9.22
2021	11.20	9.03	8.26	10.04	8.37	9.29
2022	11.30	9.14	8.38	10.07	8.50	9.46
2023	11.42	9.16	8.44	10.16	8.53	9.48
2024	11.49	9.24	8.47	10.23	8.69	9.55

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Data pada tabel 2 memperlihatkan bahwa seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah, seperti DKI Jakarta dari 10,9 tahun menjadi 11,49 tahun. meskipun menunjukkan perbaikan kualitas SDM, ketimpangan antarprovinsi dan *skill mismatch* masih menghambat penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari peran faktor-faktor ekonomi, seperti penerapan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan UMP dapat meningkatkan daya beli dan motivasi kerja sehingga dapat mendorong produktivitas pekerja. Namun demikian, dari sudut pandang produsen yang menganggap upah sebagai komponen biaya produksi, peningkatan UMP dapat menjadi tambahan beban biaya (Soebyakto et al., 2016).

Akibatnya, kenaikan tingkat gaji relatif terhadap input produksi lainnya dapat mendorong perusahaan untuk menekan permintaan tenaga kerja atau menggantikannya dengan input yang berbiaya lebih rendah (Iksan et al., 2020). Oleh karena itu, perubahan UMP memiliki dampak ganda terhadap dinamika pasar kerja.

Tabel 3. UMP Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	2.700.000	1.000.000	910.000	988.500	1.000.000	1.600.000
2016	3.100.000	2.250.000	910.000	988.500	1.000.000	1.784.000
2017	3.355.750	1.420.624	1.367.000	1.337.645	1.388.000	1.931.180
2018	3.648.036	1.544.361	1.486.065	1.454.154	1.508.895	2.099.385
2019	3.940.973	1.668.373	1.605.396	1.570.923	1.630.059	2.267.990
2020	4.276.350	1.810.351	1.742.015	1.704.608	1.768.777	2.460.997
2021	4.416.187	1.810.351	1.798.979	1.765.000	1.868.777	2.460.997
2022	4.641.854	1.841.487	1.812.935	1.840.916	1.891.567	2.501.203
2023	4.901.798	1.986.670	1.958.170	1.981.782	2.040.244	2.661.280
2024	5.067.381	2.057.495	2.036.947	2.125.898	2.165.244	2.727.812

Sumber: Data diolah, 2025.

Pada tabel 3 diketahui bahwasanya Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa mengalami kenaikan signifikan pada periode 2015-2024. Misalnya, UMP DKI Jakarta meningkat dari Rp 2.700.000 menjadi Rp 5.067.381, Jawa Tengah dari Rp

910.000 menjadi Rp 2.036.947, dan DI Yogyakarta dari Rp 988.500 menjadi Rp 2.125.898. Kenaikan di setiap Provinsi ini mencerminkan adanya penyesuaian biaya hidup serta dinamika ekonomi regional yang memengaruhi struktur pasar kerja.

Perkembangan penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari dinamika kegiatan ekonomi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indeks utama yang mencerminkan tingkat pertumbuhan dan kapasitas ekonomi daerah. PDRB merepresentasikan nilai ekonomi yang tercipta melalui aktivitas oleh berbagai sektor produksi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan PDRB umumnya mengindikasikan bertambahnya nilai output atau penjualan, sehingga berpotensi mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring dengan naiknya aktivitas produksi (Aris & Putri, 2018).

Tabel 4. PDRB ADHK Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (dalam Miliar)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	1.454.563,85	1.207.232,34	806.765,09	83.474,45	1.331.376,10	368.377,20
2016	1.539.916,88	1.275.619,24	849.099,35	87.685,81	1.405.563,51	387.835,09
2017	1.635.359,15	1.343.662,14	893.750,30	92.300,24	1.482.299,58	410.137
2018	1.735.208,29	1.419.624,14	941.091,14	98.024,01	1.563.441,82	433.782,71
2019	1.836.240,55	1.490.959,69	991.516,54	104.485,46	1.649.895,64	456.620,03
2020	1.792.291,09	1.453.380,72	965.227,27	101.698,52	1.611.392,55	441.148,58
2021	1.856.000,70	1.507.746,39	997.321,13	107.372,56	1.668.754,36	460.952,79
2022	1.953.488,99	1.589.984,93	1.050.278,09	112.901,32	1.757.874,90	484.129,42
2023	2.050.474,47	1.669.406,36	1.102.437,49	118.625,54	1.844.808,68	507.425,74
2024	2.151.198,76	1.752.124,20	1.156.998,88	124.590,45	1.935.810,15	531.735,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Pada tabel 4 diketahui bahwa keenam provinsi tersebut mencatat peningkatan PDRB yang signifikan selama 2015–2024. PDRB DKI Jakarta mengalami kenaikan

dari Rp 1.454.563,85 miliar menjadi Rp 2.151.198,76 miliar, Jawa Barat dari Rp 1.207.232,34 miliar menjadi Rp 1.752.124,20 miliar, dan Jawa Tengah dari Rp 806.765,09 miliar menjadi Rp 1.156.998,88 miliar. Meskipun demikian, peningkatan PDRB tidak selalu berimplikasi langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama apabila pertumbuhan ekonomi lebih banyak terjadi pada sektor padat modal dan berbasis teknologi.

Meskipun penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada wilayah tertentu, menggunakan kombinasi variabel yang berbeda, serta memiliki periode pengamatan yang relatif lebih pendek. Sementara itu, kajian yang menganalisis secara simultan pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja pada enam provinsi di Pulau Jawa masih terbatas, terutama dengan periode pengamatan yang lebih mutakhir dan panjang, yaitu tahun 2015–2024. Padahal, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah angkatan kerja terbesar di Indonesia namun memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, UMP, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Berdasarkan permasalahan serta hasil kajian penelitian terdahulu yang telah diuraikan, selanjutnya disusun penelitian yang berjudul **Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto**

(PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2015–2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata seberapa besar kontribusi ketiga faktor tersebut terhadap dinamika ketenagakerjaan di wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena ketenagakerjaan di Pulau Jawa, maka rumusan masalah yang diajukan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2015–2024?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2015–2024?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2015–2024?
4. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2015–2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui:
 1. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2015–2024.
 2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2015–2024.

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2015–2024.
4. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama periode 2015–2024.

b. Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara pendidikan, kebijakan upah, dan kondisi perekonomian suatu daerah dengan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi instansi yaitu sebagai tambahan referensi ilmiah di bidang ekonomi ketenagakerjaan, khususnya terkait pengaruh pendidikan, upah, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga dapat mendukung pengembangan kurikulum, penguatan materi perkuliahan, serta peningkatan kualitas penelitian mahasiswa di lingkungan kampus.

3. Bagi Peneliti Masa Mendatang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melaksanakan penelitian di masa mendatang.